

KESEIMBANGAN ETNO-DEMOGRAFIS PADA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: DAYA SAING LOKAL DALAM AKTIVITAS PEREKONOMIAN

Nazrina Zuryani

Universitas Udayana
nazrinazuryani@unud.ac.id

ABSTRAK

Etno-demografis penduduk pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara de facto dan de jure telah meminggirkan etnik Betawi. Urbanisasi penduduk Jawa, Sumatra dan pulau besar lainnya ke ibu kota Jakarta sejak Orde Baru melahirkan organisasi masyarakat termasuk Forum Betawi Rempug/FBR yang apolitis akibat lahan perumahan dan lahan usaha menjadi sangat mahal dan dikuasai oleh kaum oligarki pusat. Menyikapi rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, tulisan ini bertujuan mengantisipasi keseimbangan etno-demografis penduduk lokal agar memiliki daya saing ekonomi yang unggul. Antisipasi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas penduduk baru dan keluarganya yang akan membanjiri ibu kota baru. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur hendaknya sejak dini telah menyiapkan perangkat administrasi perkotaan yang berjangka panjang tanpa masuknya elite nasional penguasa lahan dan tuan tanah yang akan meminggirkan kelompok etnik lokal. Rencana investasi digarap dengan rancangan yang mengutamakan keuntungan kepada masyarakat setempat dan sistem rente diminimalisir secara ketat. Metode dalam tulisan ini membandingkan kondisi masyarakat Betawi dengan suku Dayak, suku Melayu dan etnik lainnya yang bermukim sejak awal di Kalimantan Timur dengan teori bonus demografi yang kelak berkiprah dalam aktivitas ekonomi pada ibu kota negara baru mendekati 100 tahun Indonesia merdeka. Temuan sementara adalah pentingnya menjaga keseimbangan etno-demografis penduduk Kalimantan Timur agar tercipta mekanisme pemerintahan di ibu kota negara baru secara kondusif.

Kata kunci: *keseimbangan; etno-demografis; daya saing lokal; aktivitas ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Pemekaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara de facto dan de jure telah meminggirkan etnik Betawi sejak tahun 70an. Miharja, Mulyana dan Izzan (2019; 134) menyebutkan sejak tahun 1978 saat gubernur Ali Sadikin menjabat, masyarakat Betawi memiliki organisasi spiritual seperti Bamus Betawi, Forum Ulama dan Habaib Betawi (Fuhab) serta tentunya Forum Betawi Rempug pasca reformasi. Skripsi Fitri Fauziah (2015) mengurai krisis organisasi Forum Betawi Rempug (FBR) dengan pendekatan hubungan masyarakat. Fauziah menyatakan organisasi FBR ini didirikan oleh KH. Fadhloli El Muhrir pada “tanggal 29 Juli 2001 pada hari minggu sambil mengacungkan golok sebagai bentuk perlawanan terhadap pendatang yang semena-mena” (2015, 46). Lahan yang disabot, dijual mahal dan

lahan usaha yang dikuasai oleh kelompok oligarki pusat menjadi penyebab perlawanan. Sejak saat itu anggota FBR tampil dengan pakaian hitam dengan sarung melingkar di leher dengan peci hitam di kepala. Selain cara berpakaian juga disiapkan berbagai program sosial, dengan melibatkan koordinator wilayah. Identitas FBR mengangkat seni Betawi dengan logo FBR yang ditengahnya bergambar ondel-ondel agar mengikat perasaan etnis masyarakat anggotanya. Selain Lenong, Tanjidor, Kasidahan, Tamborin, Samrah dalam berkesenian, pertunjukan rakyat Betawi dekat dengan budaya Sunda yang menyukai teater topeng, kliningan dan komedi. Juga para habaib (jamak) melakukan pengajian rutin, merayakan sunatan, donor darah, perayaan hari Islam, bakti sosial dengan kegiatan Korwil per gardu dan per pos selalu difasilitasi oleh humas FBR.

Berbagai aktivitas kelembagaan FBR dikenal kompak karena penyambungan lidah dalam organisasi FBR memiliki koordinator cabang wilayah dengan gardu dan pos demi pos keanggotaan yang saling mengikat. Rapat Korwil dan rapat anak gardu menjadi satu pola komunikasi dalam FBR agar anak-anak pos mendapat kabar terbaru. Krisis organisasi di tahun 2015 ini disebabkan oleh berbagai tindakan kriminal yang menimbulkan korban jiwa telah mengakibatkan FBR dikenal sebagai organisasi premanisme berbalut pakaian agama. Secara internal, FBR memperbaiki krisis kepercayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan kepada anggotanya melalui Latihan kerempugan/LK untuk mendapat keterampilan kepemimpinan, kedisiplinan dan terutama kerjasama. Rempug dalam organisasi ini diartikan sebagai persaudaraan yang diserap dari Bahasa Sunda. Awalnya organisasi ini menggalang persaudaraan untuk membantu sesama kaum Betawi yang mengalami perundungan maupun ketidak-adilan dan aktivitas FBR lebih bersifat apolitis. Namun adanya suara lantang FPI telah membawa FBR dan anggotanya dalam pusaran politik identitas.

Tulisan ini tengah mengkaji keseimbangan demografis umat beragama dan identitas lokal sebagai upaya meningkatkan daya saing penduduk Kalimantan Timur jelang bonus demografi Indonesia. Terkait pula tuntutan peningkatan daya saing lokal dalam aktivitas ekonomi yang akan semakin kompetitif pada saat pembangunan ibu kota negara Nusantara yang baru di Paser Utara dimulai, tengah berlangsung dan telah selesai. Berkaca dari lahirnya FBR di Jabodetabek diharapkan tidak terjadi kasus serupa di lokasi ibu kota negara baru kelak. Tentunya dalam konteks ini masyarakat Kalimantan yang sudah plural menjadi modelling untuk terciptanya IKN (Ibu Kota Negara/Nusantara) baru yang menjunjung kesejahteraan, keadilan dan harmoni sosial. Teori bonus demografi menjadi pangkal analisis mengingatkan IKN adalah rencana pada saat ini dan ke depannya. Masalah bonus demografi akan membutuhkan keseimbangan etno-demografis agar proses pemindahan ibu kota lama ke ibu kota baru menjadi lebih lancar tanpa turbulensi yang berarti dan mengutamakan unsur kearifan lokal masyarakat Kalimantan yang telah berhasil menggalang organisasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dengan pendekatan budaya setempat. FKUB Kalimantan Timur dengan pendekatan struktural telah berhasil memperbaiki kurikulum sekolah melalui pola pendidikan karakter pada sekolah dasar dan menengah dan menjadi model Pendidikan di Kalimantan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan studi komparasi kewilayahan pada ibu kota lama DKI Jakarta yang telah menghasilkan Forum Betawi Rempuq akibat ketidak-seimbangan etno-demografis masyarakat DKI Jakarta dan lemahnya kualitas sumber daya masyarakat asli Betawi yang tidak diantisipasi dari tahun ke tahun. Metode analisis isi mengurai keberadaan FKUB Kalimantan Timur menjadi pokok analisis sebagai modeling peningkatan karakter penduduk Kalimantan Timur bila disertai perangkat lainnya yang tepat dapat unggul bersaing. Sehingga pada saatnya kelak Kalimantan Timur dibanjiri oleh pencari kerja akibat bonus demografi pada ibu kota

baru, masyarakat lokal menggunakan daya saingnya secara kultural dan mampu beraktivitas dalam ekonomi hijau yang berkelanjutan. Maksud ekonomi hijau disini adalah perekonomian tanpa/rendahnya emisi karbondioksida, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Keseimbangan etno-demografis dianalisis dengan peningkatan kapasitas penduduk lokal yang harus bersaing dengan penduduk pendatang musiman dan pekerja migran lainnya baik ASN (Aparat Sipil Negara) ataupun keluarganya di Kalimantan Timur. Prediksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atas lapangan kerja baru di seputar Kalimantan akan meningkat 10,5 persen (Maki, CNN Indonesia, 18/09/2019) dan Kabiro Humas Kemensesneg (Sugiarto, 2022) telah pula meramalkan IKN Nusantara akan meningkatkan lebih dari 50 persen arus perdagangan menyambut Indonesia Maju di tahun 2045 dengan konsep kota cerdas (*smart city*). Tentunya prediksi ini harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur, kesiapan administratif dan terutama pola kepemimpinan negara dan pimpinan daerah yang mensejahterakan rakyat. Program investasi digarap dengan rancangan kearifan lokal dan menjauhkan sistem rente. Hasil keuntungan yang dibagi-bagi tanpa bekerja ditiadakan dan kaum oligarkis yang mendekati elite lokal sebaiknya disaring untuk menghabisi praktek kolusi, korupsi dan nepotisme/KKN yang telah menggurita di tanah air.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Penduduk asli yang bermukim sejak awal di Kalimantan Timur adalah etnis Dayak, suku Tidung, suku Kutai dan suku Paser selain kelompok etnis asli Kalimantan lain yang jumlahnya lebih dari 10 suku terkenal yang mendiami pulau Kalimantan dengan mobilitas antar provinsi yang padat. Pada provinsi Kalimantan Timur terdapat tujuh bahasa daerah yang digunakan selain bahasa Indonesia (Novianti, 2021). Kondisi lahan pekerjaan sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak, selain kelak klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan menjadi andalan. Menurut CNBC Indonesia (Sembiring, 22/02/2022) klaster yang akan dikembangkan adalah teknologi bersih, farmasi, pertanian, kimia dan energi rendah karbon dimana mobil listrik dan industri obat akan berkembang cepat. Tentunya modernisasi dan tata kelola ketenaga-kerjaan menjadi utama. Proses seleksi tenaga kerja unggul hendaknya menjadi prioritas yang mengacu pada Kerangka Kerja Nasional Indonesia agar bonus demografi dapat terkendali. Terutama peletakan jabatan-jabatan kunci membutuhkan reformasi pada Kementerian Tenaga Kerja agar dapat diproses melalui fit and proper test yang handal dan menyaring tenaga kerja sesuai kebutuhan.

3.1. Bonus Demografi

Buku ajar dan pemagangan dengan judul “Penduduk & Pajak” menganalisis kondisi penduduk Indonesia mengalami momentum bonus demografi. Artinya tahun 2012-2013 rasio beban ketergantungan Indonesia sebesar 43,5-49,6 persen (Zuryani, Arjawa & Azhar, 2016) dan momentum rendahnya rasio ketergantungan usia di luar rentang 15-64 tahun ini terjadi di Bali tahun 2010. Momentum ini dihitung secara aggregate dan diprediksi titik terendah beban ketergantungan (usia produktif menanggung usia non produktif) terjadi pada rentang tahun 2028-2031 sebagai bonus demografi Indonesia. Bonus demografi menjelaskan pola hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi agar menjadi berkah dan bukan musibah menyambut 100 tahun Indonesia (2045) merdeka. Tentunya momen bonus demografi di setiap provinsi berbeda, tergantung pada kualitas pendidikan, jaminan kesehatan, perumahan dan jaminan lain yang menanggung penduduk non produktif (anak usia 0-15 tahun dan orang lanjut usia lebih dari 64 tahun) agar tetap hidup layak. Di Kalimantan Timur, dari sudut kualitas

Pendidikan, Data Box (2021) menyebutkan persentase partisipasi sekolah penduduk sebagai berikut:

Tabel No. 1. Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Kalimantan Timur (Data 2021)

Partisipasi Sekolah	Persentase per populasi
Pendidikan Tinggi	7,14
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	24,56
Sekolah lanjutan Tingkat Pertama	13,31
Sekolah Dasar	16,91
Belum Tamat Sekolah Dasar	11,74
Tidak atau Belum Sekolah	26,33

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/23/sebanyak-714-penduduk-kaltim-berpendidikan-hingga-perguruan-tinggi-pada-juni-2021>

Data tabel No. 1 dapat menjelaskan bagaimana kelak kemampuan daya saing persentase penduduk Kalimantan Timur yang terbanyak yaitu 26,33 persen adalah tidak atau belum bersekolah ditambah dengan lulusan hingga sekolah menengah atas berkontribusi 92,85 persen dari total populasi penduduk Kalimantan Timur. Perlu upaya keras pemerintah kota dan provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaiki kualitas SDM agar mampu meningkatkan daya saing pada saat dimulainya pembangunan IKN Nusantara di wilayah Paser Penajam yang akan mengungkit aktivitas perekonomian nasional. Aturan yang jelas pada jaminan kesehatan penduduk/pekerja, bagaimana penguasaan lahan dan perumahan direncanakan, diimplementasikan dan secara terus menerus dievaluasi. Sekolah dan rumah sakit dikelola dengan kualitas mutu tertinggi begitu juga sistem transportasi dan ketahanan pangan. Pimpinan daerah sejak dini membuat aturan ketat pada penjualan lahan (perumahan, lahan produktif untuk pertanian, manufaktur dll.) serta pengelolaan kota cerdas yang memiliki akses kepada sarana publik optimal (sekolah, kampus, rumah sakit, transportasi, rumah ibadah) dalam arti seluas-luasnya.

3.2. Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Penduduk Kaltim via FKUB

Kekayaan alam Kalimantan Timur membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan berkualitas terutama tenaga ahli dalam mengelola sumber daya alam (gas alam, sumber logam tanah; emas dan perak, batu bara serta batuan andesit lainnya) yang bisa dianggap harta karun. Perekonomian Kalimantan Timur hendaknya dikelola dengan pendekatan aktivitas ekonomi hijau dan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tanpa mengorbankan hak ulayat dan bertujuan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional agar menjamin aktivitas ekonomi negara dengan ibu kota baru dapat berjalan kondusif dan memiliki daya saing di dunia internasional.

Kajian ini menjadi penting karena belajar dari ibu kota lama telah memarginalisasi masyarakat Betawi di DKI Jakarta era Orde Baru dan era Reformasi. Tentunya ruang pertumbuhan ekonomi IKN ini perlu diantisipasi melalui ketersediaan tenaga kerja usia produktif akibat dari bonus demografi menjelang tahun 2030 ke 2045 yang akan membanjiri

Kalimantan Timur. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama yang telah mengakomodasi Pendidikan Karakter setelah terjadi gesekan pada suku Tidong dengan suku Bugis di kota Tarakan pada tahun 2010 lalu (Afandi, 2018; 146) dan sejak saat itu pemuka adat dan pemuka agama bahu membahu menyemai harmoni sosial. Pendekatan kultural adalah para tokoh lintas agama sering bertemu dengan program jalan sehat, kunjungan dinas ke FKUB ke kota Tarakan, menerima trofi Hamony Award tahun 2021 dan tahun 2022 FKUB Kaltim melakukan Rapat Koordinasi/Rakor yang difasilitasi oleh Kesbangpol Kaltim agar dua kabupaten cikal bakal IKN (Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) dapat lebih erat menggelontorkan program sosial masing-masing. Afandi (2018) memperjelas keteladanan FKUB Kaltim yang telah melakukan pendekatan kultural, struktural yang menjadikan Kaltim masyarakatnya tetap religius dalam keteladanan (modeling) pendidikan karakter. Pendidikan karakter religius ini diajarkan melalui model pembelajaran reflektif di sekolah-sekolah (Afandi, 2018; 158) yang berimplikasi pada pemahaman pluralitas agama, budaya dan kesukuan. Selain itu berimplikasi pada karakter yang memiliki kematangan dalam beragama, serta memiliki kecerdasan emosional.

4. KESIMPULAN

Penjelasan tentang FBR yang semula apolitis karena banjirnya pendatang di Betawi telah merubah FBR sebagai organisasi preman berbalut agama. Tentunya di Kaltim peran FKUB Kaltim dan FKUB seluruh pulau Kalimantan akan dituntut lebih besar lagi aktivitasnya terutama dalam menyeimbangkan etno-demografis penduduk ibu kota negara baru. Mengingat dua kabupaten (Paser Utara dan Kutai Kartanegara) akan menjadi tuan rumah Ibu Kota Nusantara. Oleh sebab itu gesekan atau disharmoni sosial harus dihindari. Permintaan maaf {kasus Edy Mulyadi yang dilaporkan kepada polisi} setelah menghina tempat IKN (sebagai tempat jin buang anak) tetap} harus melalui prosedur hukum positif. Dialog dengan majelis pertimbangan masyarakat Dayak diharapkan dapat menghormati hukum adat setempat. Keseimbangan pendatang dari generasi muda akibat puncak bonus demografi segera diantisipasi dengan aturan KKNi dalam jabatan kunci yang profesional. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat meminimalisir sistem rente dan kontrak oligarkis pusat yang berakibat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) bisa terkikis melalui kearifan lokal dan standar operasi prosedur yang benar dan baku.

REKOGNISI

Ucapan terima kasih untuk almarhum Bapak Djohan Effendi, pejuang lintas agama yang berasal dari Banjarmasin dan pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Sekretariat Negara pada era presiden Abdul Rahman Wahid, beliau membuka mata saya akan arti perjuangan keadilan sosial di republik ini.

REFERENSI

- Afandi, Nur Kholik. 2018. Belajar dari Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Timur dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter (Perspektif Psikologi Lintas Agama dan Budaya). (Al Murrabi, Vol. 4 No. 2: 143-165).
- Data Box. 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/23/sebanyak-714-penduduk-kaltim-berpendidikan-hingga-perguruan-tinggi-pada-juni-2021>.

- Fitri Fauziah. 2015. Peran Hubungan Masyarakat (Humas) Forum Betawi Rempuq (FBR) dalam Mengatasi Krisis Organisasi. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Makki, Safir. 2019. Bappenas Ramal Lapangan Kerja di Ibu Kota Baru Naik 10 Persen. CNN. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190918144952-532-431601/bappenas-ramal-lapangan-kerja-di-ibu-kota-baru-naik-10-persen>.
- Miharja, Mulyana dan Izzan. 2019. Islam, Ethnicity, and the Politics of Cultural Identity Among Betawi Muslims in Jakarta. (Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, No. 4, 2: 132-143).
- Novianti, Cynthia. 2021. 7 Ragam Bahasa Kalimantan Timur dan Istilah Uniknya. Yuk Belajar! Diakses di <https://www.99.co/blog/indonesia/bahasa-kalimantantimur/#:~:text=Bahasa%20Melayu%20Berau%3B,Bahasa%20Bulungan>.
- Sembiring, Lidya Julita. 2022. Dicari Lowongan Kerja di Ibu Kota Baru, Ini Daftarnya!. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220222143558-4-317347/dicari-lowongan-kerja-di-ibu-kota-baru-ini-daftarnya>.
- Sugiaro, Eddy Cahyono. 2022. IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City. Kabiro Humas. Diakses di https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city.
- Zuryani, Nazrina. Arjawa, IGPB Suka & Azhar M. Ali. 2016. Penduduk & Pajak (Buku Ajar Hasil Penelitian Pemagangan di Bali). Bali: Udayana University Press.